

Pers Mahasiswa *Hayamwuruk*: Media Gerakan Perlawanan Ideologis Mahasiswa 1985-1998

Albertus Arga Yuda Prasetya,* Dewi Yuliati

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*argayudap@gmail.com

Abstract

Student press has been a part of the student movement. The student press reflects student ideas in specific locus and periods. Thus, zeitgeist (spirit of the age) can be known by students in general, as well as other views on a variety of specific problems. This paper discusses Hayamwuruk, a student press published in the Diponegoro University's faculty of literature in 1985. At that time, the New Order regime was the ruling regime under the rule of President Soeharto. The authoritarian New Order regime was in power from 1967 (de jure) until 1998, during the period of its ruling this regime always received criticism and resistance from various groups especially from the student group. Hayamwuruk established when new order regime had a Normalization of Campus Life/ Student Coordinating Board (NCL/SCB) policies which prohibit student to carry out political activities. This policy took effect from 1978-1990, during this period student activities are only allowed in scientific fields. This paper consists of several discussion topics. First, the establishment of Hayamwuruk. Second, explaining Hayamwuruk administrators to the issues of the New Order era. Third, finding out whether Hayamwuruk functions as a student press. The conclusion of this research is that although Hayamwuruk developed in the New Order era, Hayamwuruk dared to carry criticism on the government. However, Hayamwuruk has never banned by the government, because it was indirectly protected by campus officials. Hayamwuruk became a general reading about the aspirations and critical voices of students towards the social, political, and economic conditions that were developing during the New Order era.

Keywords: Press; Student press; the Student movement; New Order.

Abstrak

Pers mahasiswa (Persma) sudah sejak lama menjadi bagian dari gerakan mahasiswa. Dari Persma, tercerminkan gagasan-gagasan mahasiswa dalam lokus dan periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui *zeitgeist* (jiwa zaman) para mahasiswa secara umum, serta pandangan-pandangannya yang lain terhadap beragam permasalahan yang lebih spesifik. Tulisan ini membahas Persma yang terbit di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 1985 yaitu *Hayamwuruk*. Pada masa itu, rezim yang berkuasa di Indonesia adalah rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim yang berkuasa sejak 1967 (*de jure*) hingga 1998 ini memiliki watak otoriter, sehingga sepanjang perjalanannya selalu mendapatkan perlawanan dari berbagai kalangan, salah satunya dari kelompok mahasiswa. Selain itu, *Hayamwuruk* berdiri pada masa pemberlakuan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang mengekang kegiatan politik mahasiswa. Kegiatan mahasiswa hanya diperbolehkan di bidang-bidang keilmuan. Kebijakan tersebut berlaku pada 1978-1990. Tulisan ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. *Pertama*, mengetahui proses pendirian majalah *Hayamwuruk*. *Kedua*, mengungkapkan cara-cara yang dilakukan para pengelola *Hayamwuruk* dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang. *Ketiga*, menelisik apakah *Hayamwuruk* menjalankan fungsinya sebagai Persma. Berdasar pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa meskipun tumbuh dan berkembang pada era Orde Baru, *Hayamwuruk* tetap berani memuat kritik-kritik tajam terhadap pemerintah. Namun demikian, majalah ini tidak pernah mengalami pemberedelan, karena secara tidak langsung dilindungi

oleh pejabat kampus. *Hayamwuruk* menjadi pelengkap bacaan umum tentang aspirasi dan suara kritis mahasiswa terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berkembang pada zamannya.

Kata Kunci: Pers; Pers Mahasiswa; Gerakan Mahasiswa; Orde Baru.

Pendahuluan

Persma merupakan penerbitan yang dikelola oleh mahasiswa. Notosusanto, seperti dikutip dalam Siregar (1983), menyatakan bahwa Persma di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda (Siregar, 1983). Beberapa Persma yang terbit pada waktu itu antara lain *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia, terbitan berkala *Jong Java* dan *Oesaha Pemuda*. Persma merupakan entitas sintetis antara pers dan mahasiswa. Sebagai “pers”, Persma dituntut mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi persnya secara konsekuen dan independen, sementara sebagai “mahasiswa”, Persma dituntut untuk memelopori perubahan (Arifin, 2000).

Sebagai entitas pers, Persma menjalankan fungsinya sebagai pers untuk menyediakan informasi bagi setiap orang yang ada dalam berbagai institusi sosial. Pers memerlukan kebebasan pers yang mensyaratkan orientasi kepada kebenaran faktual dari kehidupan sosial sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kebebasan pers, masyarakat juga dapat menyampaikan pendapatnya dalam ruang publik. Kebebasan pers penting untuk mewujudkan negara yang demokratis, yaitu negara yang seluruh proses sosialnya didasarkan pada negosiasi sosial, akuntabilitas setiap institusi negara, dan kredibilitas personal setiap elit sosial. Fungsi pers yang bersumber dari norma otoritarianisme menjadikan pers menjalankan fungsi yang bersifat instruktif (*top-down*) untuk kepentingan penguasa (Siregar, 2000).

Gerakan sosial-politik tampil dalam beragam medium ekspresi. Bentuk-bentuk itu antara lain surat kabar, jurnal, rapat dan pertemuan, serikat buruh dan pemogokan, organisasi dan partai, pemberontakan, serta karya seni seperti teater, novel, dan nyanyian (Shiraisi, 1997). Surat kabar/media massa/pers adalah salah satu media ekspresi perlawanan yang paling umum digunakan. Persma hampir selalu menjadi penyokong aktif gerakan mahasiswa, baik sebagai pembentukan wacana, wadah dan kawan berdiskusi, maupun media propaganda. Persma mampu membangkitkan kesadaran subjektif mahasiswa untuk mendorong timbulnya gerakan mahasiswa karena: *pertama*, artikel-artikel yang dimuat oleh Persma merupakan karya mahasiswa sendiri, sehingga mencerminkan sebagian harapan, pemikiran, kehendak, dan sikap mahasiswa; *kedua*, sasaran pembacanya adalah mahasiswa, sehingga isinya merekam banyak aktivitas mahasiswa, termasuk aktivitas politiknya (Supriyanto, 1998).

Persma bisa dibedakan menjadi dua berdasar pada tema dan isi materinya. *Pertama*, Persma khusus, yaitu Persma yang terbit di suatu fakultas atau jurusan dan pembahasannya sesuai dengan bidang keilmuan dari fakultas atau jurusan tersebut. *Kedua*, Persma umum, yaitu Persma yang membahas isu-isu umum selayaknya media massa dan tidak dibatasi bidang keilmuan tertentu. Persma umum biasanya membahas tema-tema sosial-politik. Persma memiliki sifat *adversary journalism* (jurnalisme penantang) karena sering kali kontennya mengkritisi kemapanan. Dengan sifat demikian, Persma lebih mirip *journal of opinion* karena kontennya yang menunjukkan pandangan dan sikap politik pengelolanya (Dhakidae, 1977). Dalam kajian-kajian akademik sangat jarang topik Persma, akan lebih mudah ditemukan topik-topik seputar pers umum dan gerakan mahasiswa.

Tulisan ini membahas salah satu Persma bernama *Hayamwuruk*. *Hayamwuruk* berdiri pada tanggal 16 Maret 1985 di Fakultas Sastra (pada 2009 berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya /FIB) UNDIP. Hidup dalam kondisi penerapan kebijakan NKK/BKK, edisi-edisi awal *Hayamwuruk* lebih banyak membahas isu-isu yang sesuai dengan tiga jurusan keilmuan di Fakultas Sastra pada masa itu, yaitu Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Ilmu Sejarah. Kebijakan

NKK/BKK mengekang mahasiswa untuk berpolitik dan memaksa mahasiswa lebih fokus pada bidang-bidang keilmuan. Pada 1987, *Hayamwuruk* mulai mengangkat tema-tema politik. Para pengelolanya juga punya andil dalam gerakan mahasiswa di tingkat kampus hingga tingkat nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah terdiri atas empat tahapan yang dilakukan secara berurutan mulai dari penentuan topik penelitian, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang memiliki kedekatan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer penelitian ini adalah arsip-arsip dan majalah-majalah *Hayamwuruk* yang diterbitkan dari 1985-1998, serta wawancara dari beberapa mantan pengelola majalah pada periode tersebut. Sementara itu, sumber-sumber sekunder penelitian ini adalah semua tulisan mengenai permasalahan pers dan Persma.

Setelah melakukan pengumpulan sumber, tahapan penelitian dilanjutkan dengan kritik sumber, yaitu kegiatan menguji keaslian dan kredibilitas dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber dibedakan menjadi dua. *Pertama*, kritik eksternal untuk menguji otentitas suatu sumber agar sumber-sumber yang diperoleh bukanlah sumber tiruan atau palsu. *Kedua*, adalah kritik internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan informasi-informasi dari sumber-sumber yang diperoleh, sehingga didapat fakta-fakta sejarah yang kredibel.

Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu mencari saling hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan berdasar pada hubungan kronologis dan kausalitas (sebab-akibat). Proses interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis dilakukan untuk menguraikan unsur-unsur yang merupakan pembentuk peristiwa yang diteliti, sedangkan sintesis adalah kegiatan menyatukan fakta-fakta sejarah. Tahap terakhir dari metode sejarah adalah penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Menurut Gottschalk (1985), historiografi adalah tahap rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasar pada fakta-fakta yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan analisis kritis. Fakta-fakta yang sudah melalui proses sintesis dipaparkan secara logis, kronologis, dan ilmiah.

Pendirian *Hayamwuruk*

Hayamwuruk bukanlah Persma pertama yang diterbitkan di Undip. Pada 1976, terbit *Edents* di Fakultas Ekonomi Undip dan pada 1977 terbit *Majalah Mahasiswa* (kemudian bernama *Gema Keadilan*) di Fakultas Hukum Undip. Dalam *Hayamwuruk* edisi No.1 Th.IV/1988, terdapat tulisan tentang sejarah *Hayamwuruk*. Sebelum *Hayamwuruk*, terbit majalah bernama *Mutasi* di Fakultas Sastra Undip pada 1983. *Mutasi* diterbitkan secara swadaya oleh para mahasiswa, sehingga pendanaan dan pengelolannya dikerjakan secara mandiri. Para penggagas *Mutasi* adalah beberapa mahasiswa Fakultas Sastra Undip yang aktif di organ-organ mahasiswa lain seperti Teater Emper Kampus (Teater Emka), Senat Mahasiswa (SM), dan organ-organ ekstra universitas. *Mutasi* terbit secara tidak teratur karena keterbatasan dana dan kesibukan para pengelolanya pada akhirnya berhenti terbit.

Meski *Mutasi* berhenti terbit, beberapa pendirinya mencoba mendirikan Persma lagi. Gagasan pendirian Persma tersebut disampaikan kepada Dekan Fakultas Sastra, lalu gagasan itu diakomodir. Diakomodirnya gagasan ini menyebabkan Persma ini akan berada di bawah naungan kampus. Pada 16 Maret 1985, *Hayamwuruk* didirikan untuk mengganti *Mutasi*.

Pendirian Persma baru ini karena kegelisahan tidak adanya Persma di Fakultas Sastra setelah gagalnya *Mutasi. Hayamwuruk* terbit dengan *motto Jujur dan Tidak Menggurui* serta berukuran kecil. Salah satu ciri khas *Hayamwuruk* edisi-edisi awal ini adalah halaman sampulnya yang menampilkan karikatur dari orang-orang yang diwawancara (Wawancara dengan Gunawan Budi Susanto, 18 Agustus 2018).

Di bawah Pemimpin Umum (PU) Heddy Lugito, *Hayamwuruk* memperoleh *International Standar Series Number* (ISSN) dengan nomor 0215-1553 pada 1986 dan mendapat Surat Keputusan (SK) Rektor Undip No.57/SK/PT09/1987. Para pengelola *Hayamwuruk* mematangkan majalah tersebut pada 1987 dengan memperbesar ukurannya menjadi sama dengan ukuran majalah pada umumnya, mengubah *motto Hayamwuruk* menjadi *Refleksi Budaya dan Intelektualitas Mahasiswa*, mengubah logo, dan mengubah gambar sampul yang disesuaikan dengan tema utama yang sedang dibahas. Ciri khas baru ditambahkan dengan menampilkan bingkai putih tipis di halaman sampul yang mencerminkan semangat non-partisan, upaya bersikap objektif, dan merangkum perbedaan gagasan para pengelolanya. Dengan pembaruan-pembaruan ini, para pengelola *Hayamwuruk* mulai melampaui tema-tema sejarah, sastra, dan budaya dengan memuat tulisan-tulisan yang bertema politik secara kritis terhadap situasi pada zamannya (Lembaga Pers Mahasiswa Hayamwuruk, 2020).

Kiprah Hayamwuruk

Sebagai bagian dari mahasiswa, para pengelola *Hayamwuruk* merupakan penggerak-penggerak kampus dan aktif mengkritisi berbagai persoalan. Mereka terlibat dalam berbagai permasalahan yang sedang muncul baik di tingkat kampus hingga tingkat nasional. Keterlibatan mereka ditunjukkan dengan tulisan-tulisan yang diterbitkan di *Hayamwuruk*, baik itu hasil reportase yang mereka kerjakan, opini-opini para pengelolanya, hingga opini-opini dari orang-orang lain. Tidak hanya lewat tulisan, beberapa pengelola *Hayamwuruk* juga terlibat aktif di berbagai gerakan dan kelompok mahasiswa. Beberapa di antara mereka menggerakkan demo-demo mahasiswa dan membentuk kelompok-kelompok gerakan mahasiswa. Sebagai Persma yang terbit di masa pemerintahan Orba, *Hayamwuruk* turut menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang melakukan perlawanan terhadap rezim Orba.

Mula-mula, kritisisme *Hayamwuruk* terwujud dalam gerakan-gerakan di dalam kampus. Ada banyak permasalahan di dalam kampus, tetapi ada dua isu utama yang sering menjadi pembahasan di *Hayamwuruk*. *Pertama*, isu organisasi mahasiswa seperti resimen mahasiswa (Menwa) dan senat mahasiswa, *kedua*, isu mengenai dana-dana pungutan di Fakultas Sastra Undip. Pada 1988, muncul gelombang penolakan atas munculnya wacana penarikan dana di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang bernama Badan Musyawarah Orang Tua Mahasiswa (BMOM) di Fakultas Sastra UNDIP. Aksi-aksi penolakan mulai diadakan pada 1988. Tulisan-tulisan mengenai BMOM dapat ditemukan dalam beberapa edisi majalah. Ketika BMOM berubah nama menjadi Dana Pengembangan Akademis (DPA), mahasiswa tetap menolak karena dianggap tidak ada perbedaan antara DPA dan BMOM. Berbeda dengan BMOM yang dalam perumusannya masih membuka ruang dialog dengan mahasiswa, penetapan DPA tidak demikian. Pada tahun 1991, terjadi aksi penolakan DPA, beberapa pengelola *Hayamwuruk* terlibat dalam aksi ini (*Hayamwuruk* edisi No.1 Th.VI/1991).

Terkait isu organisasi mahasiswa, ada dua organisasi yang sering diulas dalam *Hayamwuruk* yaitu Resimen Mahasiswa (Menwa) dan Senat Mahasiswa (Sema), baik Sema Fakultas Sastra maupun Sema Perguruan Tinggi (SMPT). Menwa dianggap sebagai representasi militer dalam kampus yang tugasnya memata-matai aktivitas mahasiswa. Selain itu, ada beberapa kasus di mana Menwa berlaku sewenang-wenang kepada mahasiswa, salah satu anggota *Hayamwuruk* pernah jadi korban (Wawancara dengan Arwani, 2 September 2018 dan *Hayamwuruk* edisi No.2 Th.V/1990). Sementara, Sema sering diulas karena keberadaannya yang sentral dalam aktivitas politik mahasiswa dan bisa menyalurkan aspirasi mahasiswa. Namun

demikian, Sema sering kali tidak berfungsi optimal dan menjadi ajang perebutan kursi saja. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi mahasiswa ketika dilangsungkan pemilihan senat (*Hayamwuruk* edisi No. 2 Th.VII/1992).

Tidak hanya di isu-isu internal kampus saja, para pengelola *Hayamwuruk* juga mengkritisi isu-isu nasional. Beberapa tokoh-tokoh yang kritis dan bahkan menjadi oposan Orba menjadi narasumber seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Arief Budiman, George Junus Aditjondro, Ali Sadikin, Pramodya Ananta Toer, Y.B. Mangunwijaya, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Lubis, dan lain-lain. Pada *Hayamwuruk* edisi No.1 Th.VI/1988, mulai dimuat tulisan-tulisan yang bertema politik. Isu-isu yang banyak diangkat adalah tentang demokasi dan hak asasi manusia (HAM). Mengenai isu HAM, Fakultas Sastra UNDIP telah memiliki agenda rutin sejak 1988 untuk memperingati Hari HAM setiap 10 Desember di halaman gedung fakultas. Bentuk peringatan ini dilakukan dengan aksi teatrikal, pembacaan orasi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, pembacaan puisi, dan bentuk pertunjukan seni lainnya. Para penggerak awal peringatan ini adalah beberapa eksponen *Hayamwuruk* dan Teater Emka, dua organisasi yang sudah sejak awal berkolaborasi dalam membangun kritisisme mahasiswa di Fakultas Sastra (Wawancara dengan Gunawan Budi Susanto, 18 Agustus 2018 dan *Hayamwuruk* edisi No.2 Th.VIII/1993).

Pada 20 Mei 1992, Forum Mahasiswa Semarang (FMS) yang berjumlah 30 orang memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan menggelar upacara. Kegiatan ini dinamakan "Apel Siaga Kebangkitan Nasional" dengan bentuk pertunjukkan teater komedi. Kegiatan ini merupakan kritik para mahasiswa terhadap pemilu pada era Orba. Beberapa anggota *Hayamwuruk* seperti Bustanul Arifin, Arwani, Petrus Hariyanto, dan Aona Soka terlibat dalam aksi ini. Aksi ini sering disebut sebagai Aksi Golput karena menyerukan untuk tidak memilih selama pemilu atau disebut golongan putih (golput). Aksi ini bertepatan dengan penyelenggaraan pemilu pada 9 Juni 1992. Ketika acara selesai pada pukul 11.30, empat mahasiswa ditangkap oleh polisi tanpa surat penangkapan. Esoknya, dua orang dibebaskan dan menyisakan Lukas Luwarso dan Poltak Ike Wibowo yang akan dihadapkan ke meja persidangan dengan tuduhan melanggar pasal 154 KUHP atau tindak pidana subversif (*Hayamwuruk* edisi No.2 Th.VII/1992 dan *Hayamwuruk* edisi No.3 Th.VIII/1993).

Setelah kasus Aksi Golput, Petrus Hariyanto dan Fanani, keduanya pengelola *Hayamwuruk*, membentuk Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS) pada akhir 1992 dengan maksud melakukan advokasi nonhukum atas kasus penangkapan Lukas dan Poltak dengan membangkitkan perlawanan mahasiswa. Petrus menjadi koordinator SMS sembari tetap mengelola *Hayamwuruk*. Ketika Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dideklarasikan pada 1994, SMS menjadi SMID cabang Semarang pada 1995. Beberapa anggota *Hayamwuruk* terlibat dalam SMID. Mereka terlibat dalam SMID baik selama menjabat sebagai pengelola atau anggota *Hayamwuruk* maupun setelah tidak menjabat (Wawancara dengan Petrus Hariyanto, 18 November 2018 dan dengan Aan Rusdiyanto, 19 November 2018). Selama mereka menjabat pada 1994-1995, tema-tema penerbitan dan isu-isu yang diliput *Hayamwuruk* sering kali sejalan dengan isu-isu yang sejalan dengan perjuangan SMID seperti isu buruh, demokrasi, agraria, atau tema-tema kesenian kerakyatan.

Beberapa anggota *Hayamwuruk* juga terlibat di pergerakan pers dan Persma. Pada 27-30 Maret 1989, *Hayamwuruk* menyelenggarakan "Pendidikan Pers Mahasiswa Tingkat Dasar dalam Rangka Pekan Pers Mahasiswa Se-Jawa Bali" (Fathoni dkk, 2012). Kegiatan pelatihan semacam ini biasanya dimanfaatkan para Persma untuk berkonsolidasi dan membicarakan permasalahan wadah pusat untuk menghimpun Persma. Pada waktu itu, Persma mengalami perpecahan antara melanjutkan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), organisasi yang sudah berdiri sejak 1958 namun mengalami hiatus pada awal 1980, dan pendapat untuk mendirikan wadah tunggal yang baru. Pembahasan demikian terjadi beberapa kali sepanjang periode 1980-1990an.

Hayamwuruk pernah beberapa kali mengutus anggota-anggotanya untuk ikut dalam konsolidasi tersebut. Pada Juli 1991 diselenggarakan prakongres IPMI di Bandung. *Hayamwuruk*

mengutus tiga orang anggotanya (*Hayamwuruk* edisi No.1 Th.VI/1991). Dari kongres ini diputuskan untuk tidak melanjutkan IPMI dan mendirikan Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Namun demikian terjadi perdebatan lanjutan, yaitu apakah akan menggunakan penyebutan penerbitan atau pers mahasiswa dalam singkatan PPMI. Penggunaan istilah penerbitan mahasiswa dinilai lebih aman jika ingin mengadakan kegiatan, sementara menggunakan istilah pers mahasiswa/Persma merupakan wujud perlawanan terhadap rezim Orba (Fathoni, dkk, 2012). Sebelumnya, pemerintah mencoba mengganti penyebutan pers mahasiswa yang sudah umum menjadi penerbitan mahasiswa dengan membentuk Tim Pembina Pers Kampus Mahasiswa Tingkat Nasional pada 31 Mei 1980 (Sukarno, 1986).

Terkait permasalahan ini, *Hayamwuruk* bersikap menolak penggunaan penyebutan penerbitan mahasiswa. Sikap ini disampaikan dalam Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Indonesia di Universitas Brawijaya, Malang, yang diselenggarakan pada 15-17 Oktober 1992. Pada waktu itu, *Hayamwuruk* mengutus Syamsul Hidayat (Pemimpin Umum/PU dan Pimpinan Redaksi/Pimred) dan Petrus Hariyanto (Wakil Pimred). Selain persoalan istilah, di dalam tubuh *Hayamwuruk* terdapat perdebatan lain, yaitu soal apakah perlu pendirian wadah tunggal, dalam hal ini PPMI, ataupun tidak perlu. Alasan penolakan wadah tunggal yaitu munculnya kekhawatiran jika wadah tunggal bisa menjadi alat bagi rezim untuk mengontrol Persma. Sementara, alasan setuju pendirian wadah tunggal adalah karena perlunya antar Persma bersatu dalam melawan Orba. Polemik internal ini pada akhirnya terjembatani dengan menolak PPMI jika menggunakan istilah penerbitan mahasiswa (Wawancara dengan Syamsul Hidayat, 3 November 2018 dan dengan Petrus Hariyanto, 18 November 2018).

Pada 1993, pemberedelan menimpa *Arena*, Persma Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Sunan Kalijaga (kemudian berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta. Pembredelan ini direspon dengan munculnya aksi-aksi solidaritas di berbagai kota, seperti di Semarang, Malang, Jakarta, dan Yogyakarta. Di Semarang, aksi ini digerakkan oleh beberapa anggota *Hayamwuruk* dan mengajak beberapa Persma lain, seperti *Opini* dan *Edents* dengan membentuk Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Semarang (FKPMS). Aksi ini bernama Aksi Keprihatinan Pembredelan Pers Mahasiswa (Wawancara dengan Petrus Hariyanto, 18 November 2018).

Pada 1994, *Hayamwuruk* mulai mengubah posisinya terhadap PPMI. Para pengurus baru *Hayamwuruk* lebih radikal dan beberapa memiliki afiliasi dengan SMID. Sikap SMID yang sepakat dengan PPMI mempengaruhi *Hayamwuruk* yang tidak lagi menolak keberadaan PPMI. Pada 21 Juni 1994, pemberedelan menimpa *Tempo*, *DeTik*, dan *Editor*. Untuk merespon ini, digelar aksi di Semarang pada 22 Juni 1994. Penggerak aksi ini mengatasnamakan Presidium PPMI dan FKPMS (Prambadi dkk, 1994). Pada tahun yang sama, tepatnya 11-15 Desember 1994, diadakan pertemuan Persma se-Indonesia di Jombang. Kota Semarang diwakili Aan Rusdiyanto, salah satu anggota *Hayamwuruk*. Dari pertemuan tersebut, Aan mendapat tugas untuk mendirikan Dewan Kota PPMI Semarang (Fathoni, 2012; Wawancara dengan Aan Rusdiyanto, 19 November 2018).

Memasuki 1996, dideklarasikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 24 Juli 1996. Organisasi ini sebelumnya bernama Perhimpunan Rakyat Demokratik yang menghimpun beberapa organisasi lainnya, salah satunya Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Organisasi-organisasi yang dahulu berhimpun dalam Perhimpunan Rakyat Demokratik lantas menjadi *underbouw* PRD. Petrus ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PRD, namun demikian dia sudah tidak lagi aktif sebagai anggota *Hayamwuruk* pada waktu itu. Ketika terjadi penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996, PRD dituduh oleh pemerintah sebagai dalang dari penyerangan tersebut. Peristiwa ini sering disebut sebagai Kerusuhan 27 Juli 1996 atau disingkat Kudatuli. Hal ini menyebabkan pelarangan PRD dan semua organisasi *underbouw*-nya, termasuk SMID, dan perburuan para anggotanya oleh aparat militer. Kondisi ini menyebabkan gerakan sosial baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan umum tiarap.

Hayamwuruk terkena imbas dari tiarapnya gerakan sosial ini. Beberapa anggota *Hayamwuruk* yang terlibat SMID memilih mengamankan diri. *Hayamwuruk* hampir berhenti terbit karena kekurangan anggota aktif. Pada situasi seperti itu, pada 1996 seorang pejabat dekanat Fakultas Sastra menuduh bahwa *Hayamwuruk* adalah antek-antek SMID dan kerjanya hanya menjelek-jelekkan fakultas. Tuduhan ini disangkal oleh pengelola *Hayamwuruk* lewat tulisan di rubrik “Dari Meja *Hayamwuruk*” edisi No.01 Th.XI/1997 yang menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena sikap jurnalisme *Hayamwuruk* yang bukan jurnalisme partai politik (parpol) yang pasti memihak salah satu kelompok. Pembelaan ini separuh benar mengingat meski antara 1994-1996 beberapa tema yang diangkat *Hayamwuruk* condong dengan tema-tema perjuangan PRD dan beberapa anggotanya menjadi bagian dari PRD dan SMID, tetapi *Hayamwuruk* masih menerbitkan tema-tema dan tulisan-tulisan yang sejalan dengan bidang keilmuan di Fakultas Sastra. Bagaimanapun juga, para pengelola *Hayamwuruk* harus berpegang pada nilai organisasi yang termanifestasi dalam bingkai putih di halaman sampul. Selain itu, sebagian anggota *Hayamwuruk* bukanlah aktivis mahasiswa dan tidak tergabung dalam PRD dan SMID.

Pada 1996 pula, saat penerimaan mahasiswa baru, pihak rektorat UNDIP dan Dekanat Fakultas Sastra UNDIP menyatakan kepada mahasiswa untuk “tidak terlibat gerakan yang aneh-aneh”. Dengan iklim yang seperti ini, gerakan mahasiswa di Fakultas Sastra lebih fokus ke isu-isu internal kampus. Beberapa anggota *Hayamwuruk* tetap terlibat dalam gerakan-gerakan ini dan bentuk-bentuk aktivisme lainnya, seperti menolak uang pungutan perpustakaan dan pendirian Dewan Mahasiswa Fakultas Sastra Undip karena Sema Fakultas Sastra tidak berfungsi pada periode 1998 (Wawancara dengan Basfin Siregar, 19 November 2018). Namun demikian, *Hayamwuruk* masih mengkritisi situasi politik yang ada. Salah satu hal yang terlihat adalah terbitnya *Hayamwuruk* edisi No.2 Th.X/1996 yang memuat tulisan-tulisan tentang permasalahan pemilu selama masa Orba. Lalu, dalam *Hayamwuruk* edisi No.1 Th.XI/1997 isu yang dibahas mengenai Paket 5 Undang-Undang (UU) Politik dan tidak independennya lembaga peradilan. *Hayamwuruk* mewawancarai beberapa tokoh yang di antaranya merasa Paket 5 UU Politik menyebabkan macetnya demokrasi di Indonesia.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa *Hayamwuruk* didirikan sebagai media bagi para mahasiswa Fakultas Sastra UNDIP untuk mengutarakan gagasan-gagasannya. Meski *Hayamwuruk* didirikan di Fakultas Sastra, tetapi menengok isu-isu yang dibahas, *Hayamwuruk* dapat dikategorikan sebagai Persma umum. Selain itu, *Hayamwuruk* menjadi bagian dari kelompok Persma yang berposisi dengan rezim Orba. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya tulisan, bahkan beberapa tema utama dalam edisi-edisi tertentu, yang mengkritisi Orba. Sikap kritis *Hayamwuruk* juga ditujukan kepada isu-isu yang dekat dengan mereka, yaitu isu-isu kampus. Selain itu, beberapa anggotanya terlibat aktif dalam gerakan-gerakan mahasiswa, baik itu yang bersifat spontan atau yang lebih terstruktur, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus.

Keterbatasan *Hayamwuruk* sebagai Persma yang para anggotanya berganti setiap periode tertentu tidak menyebabkan *Hayamwuruk* berhenti berupaya menjalankan fungsinya sebagai pers. Terbatasnya kebebasan pers pada masa Orba tidak membuat *Hayamwuruk* berhenti mengkritisi pemerintah, hal yang juga dilakukan oleh beberapa Persma lainnya. Persma pada masa itu menjadi media alternatif untuk menyampaikan gagasan dan kritik para mahasiswa maupun tokoh-tokoh oposan pemerintah yang sulit untuk disalurkan di media umum. Selain itu para pembaca Persma, terutama mahasiswa, dapat memperoleh pemikiran-pemikiran dan informasi-informasi yang tidak dimuat oleh media umum. Dalam sejarah Orba, baik pers dan Persma pernah mengalami pemberedelan jika terlalu vokal. Biasanya Persma diberedel oleh pejabat kampus yang diancam pemerintah atau yang khawatir jika mereka ditekan. Namun

demikian, *Hayamwuruk* tidak pernah diberedel karena adanya pejabat Dekanat di Fakultas Sastra UNDIP yang masih membuka ruang-ruang kebebasan berekspresi.

Referensi

- Hayamwuruk* edisi No.1 Th.IV/1988.
Hayamwuruk edisi No.2 Th.V/1990.
Hayamwuruk edisi No.1 Th.VI/1991.
Hayamwuruk edisi No. 2 Th.VII/1992.
Hayamwuruk edisi No.2 Th.VIII/1993.
Hayamwuruk edisi No.3 Th.VIII/1993.
Hayamwuruk edisi No.2 Th.X/1996.
Hayamwuruk edisi No.01 Th.XI/1997.
Hayamwuruk edisi No.1 Th.XI/1997.
- Arifin, Luqman Hakim, "Cerita Panjang dari Lombok", *Balairung* edisi 32/Tahun XV/2000. Dikutip dalam Hasan Bachtiar, "Pers Mahasiswa Pasca-21 Mei 1998: Menuntaskan Romantisme Sejarah", makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional Pers Mahasiswa yang diadakan Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 18-19 September 2000.
- Dhakidae, Daniel, "Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers", *Prisma*, No.10 Oktober 1977.
- Fathoni, Moh., dkk., (2012). *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*. Depok: Komodo Books.
- Siregar, Ashadi (2000). "Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4(2).
- Gottschalk, Louis (1985). *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Kuntowijoyo (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lembaga Pers Mahasiswa Hayamwuruk (2020). "Buku Putih Hayamwuruk". Tidak diterbitkan.
- Prambadi, Didi, dkk. (1994). *Buku Putih TEMPO: Pembredelan Itu*. Jakarta: Alumni Majalah TEMPO.
- Shiraishi, Takashi (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukarno (1986). *Pers Bebas Bertanggung Jawab: Himpunan Pidato / Ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Supriyanto, Didik (1998). *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Informan

Aan Rusdiyanto
Arwani
Basfin Siregar
Gunawan Budi Susanto
Petrus Hariyanto
Syamsul Hidayat